

ABSTRAK

RAZALI/ B 23031015 / 2025 / Analisis Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb Dalam Perkara Pengeboran Minyak Mentah Ilegal (*Illegal Drilling*) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2

Eksplorasi/pengeboran minyak mentah di Indonesia sendiri secara sah dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina. Di wilayah Indonesia ada sekitar 4.000 titik sumur minyak tersebar di daerah penambangan minyak yang sudah cukup tua dan oleh Pertamina tidak lagi diusahakan dengan alasan tidak ekonomis, yakni produksinya rendah tetapi ongkos produksinya tinggi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb terhadap perkara pengeboran minyak mentah ilegal (*illegal drilling*) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Untuk memahami dan menganalisis pertimbangan putusan perkara Nomor: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb terhadap pengeboran minyak mentah ilegal (*Illegal Drilling*) dinilai sudahkah menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan mencerminkan rasa keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Adapun bahan hukum dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Terdakwa dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya dengan pidana penjara pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah) dalam perkara ini meskipun jaksa menuntut 4 tahun namun terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah). Putusan majelis hakim yang pada akhirnya hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00.- (sepuluh juta rupiah) masih terlalu ringan. Maka vonis hakim tersebut dinilai masih terlalu ringan sehingga masih belum memberikan contoh efek jera terhadap pelaku lainnya dan belum mencerminkan rasa keadilan. Saran yang dikemukakan hendaknya masyarakat harus lebih dalam bekerjasama seperti halnya cepat melaporkan kepada pihak Kepolisian apa bila di wilayahnya terdapat kegiatan/aktivitas pertambangan minyak mentah ilegal. Hal ini bertujuan agar kerusakan lingkungan yang di akibatkan pertambangan minyak mentah ilegal tidak berdampak terhadap lingkungan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Analisis Putusan, Perkara Pengeboran Minyak Mentah Ilegal (*Illegal Drilling*)

ABSTRACT

RAZALI/ B 23031015 / 2025 / Analysis of Decision Number: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb in the Case of Illegal Crude Oil Drilling (Illegal Drilling) in the Jurisdiction of the Jambi District Court / Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., as 1st advisor and Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., as 2nd advisor.

Crude oil exploration and drilling in Indonesia is legally managed by the state-owned enterprise (BUMN), Pertamina. There are approximately 4,000 oil wells in Indonesia, scattered across mature oil fields, which Pertamina has discontinued due to their low production and high production costs. The purpose of this study is to understand and analyze the basis for the judge's legal considerations in issuing Decision Number: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb regarding the case of illegal crude oil drilling in the jurisdiction of the Jambi District Court. To understand and analyze the considerations of the decision in case Number: 645/Pid.Sus/Lh/2023/Pn.Jmb regarding illegal crude oil drilling (Illegal Drilling), it is assessed whether it has had a deterrent effect on the defendant and reflects a sense of justice. The specification of this research is Descriptive Analytical research. In writing this thesis, the author uses a normative legal approach method. The legal materials in this thesis research are obtained through Library Research. The defendant was found guilty and the defendant must be given a sentence commensurate with his actions, which is threatened with a prison sentence of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 60.000.000.000,00.- (sixty billion rupiah). In this case, even though the prosecutor suggested 4 years, the defendant was instead sentenced to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 10.000.000,00.- (ten million rupiah). The panel of judges' verdict, which ultimately imposed only one year in prison and a fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah), was still too lenient. Therefore, the judge's verdict was deemed too lenient, failing to serve as a deterrent to other perpetrators and not reflecting a sense of justice. The suggestion put forward is that the community should be more cooperative, such as quickly reporting to the police if there are illegal crude oil mining activities in their area. This aims to ensure that environmental damage caused by illegal crude oil mining does not impact the surrounding community environment.

Keywords: Decision Analysis, Illegal Crude Oil Drilling Case (Illegal Drilling)